

BUPATI MERANGIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 huruf 1 juncto Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN

dan

BUPATI MERANGIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Merangin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Retribusi daerah , yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lembaga lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Tera Ulang adalah menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tangan tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
10. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan/atau kuantitas.
11. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
12. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
13. Alat perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat, ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
14. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya atau disingkat dengan UTTP adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan/atau kuantitas, Kuantitas atau penakaran, massa atau penimbangan, serta perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
15. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup, yang untuk menggunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
17. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk

memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

18. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
22. Satu hari adalah dua puluh empat jam dan satu bulan adalah waktutiga puluh hari.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
24. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa Tera/Tera Ulang yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang meliputi :

- a. Pelayanan pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya; dan
- b. Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Tera/Tera Ulang.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Tera/Tera Ulang meliputi orang pribadi ataupunjamin yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas pelayanan jasa tera/tera ulang.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemberian jasa pelayanan dan pembinaan, serta tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas alat UTTP/BDKT, lamanya waktu dan peralatan yang digunakan.

BAB V PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan pada standar satuan ukuran yang dipergunakan dan tingkat kesulitan alat UTTP.

- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali semenjak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang terutang dipungut di wilayah Daerah, tempat pelayanan diberikan.

BAB VIII PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUDAAN PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke kas Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan setelah 30 (tiga puluh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah surat Teguran diterima, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII KEBERATAN

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 16

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.

- (3) Keputusan bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 17

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat

terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.

- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 20

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 21

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
pada tanggal 14 Mei 2013

BUPATI MERANGIN,

ttd

N A L I M

Diundangkan di Bangko
pada tanggal 15 Mei 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN

ttd

SUHAIBI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2013 NOMOR 01

Salinan sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

MUHAMAD ZEN

PEMBINA

Nip.196705051991031002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMORTAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI TERA ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG
DAN PERLENGKAPANNYA

I. UMUM

Penggunaan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) pada masa sekarang tidak terbatas sebagai alat transaksi penyerahan barang atau jasa, tetapi juga sebagai alat untuk menentukan pungutan atau upah, untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, untuk pemakaian dan pengawasan dalam perusahaan serta untuk kepentingan umum.

Pihak-pihak yang berkepentingan menginginkan adanya jaminan dan keyakinan mengenai kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian alat UTTP tersebut.

Untuk menjamin kebenaran pengukuran serta melindungi pihak-pihak yang berkepentingan maka terhadap alat UTTP tersebut perlu ditera, ditera ulang, dikalibrasi dan/atau dijustir.

Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dinyatakan bahwa untuk pekerjaan tera dan tera ulang atau pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan pengujian alat UTTP dikenakan biaya tera.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, bahwa Daerah dapat melakukan pungutan sesuai dengan kewenangan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (5) angka 5 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Kabupaten sebagai Daerah otonom bahwa kewenangan pengelolaan kemetrologian ada pada Pemerintah Kabupaten.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Dalam kenyataannya, tidak semua alat UTTP langsung digunakan, tetapi ada juga yang tidak langsung digunakan untuk

menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan, misalnya Alat UTTP yang dipamerkan, disimpan, atau ditawarkan atau diperjualbelikan dalam keadaan siap pakai.

Kepentingan umum disini mempunyai arti khusus sesuai dengan maksud dan tujuan pasal 25 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981, yaitu merupakan kepentingan diluar kepentingan usaha, menyerahkan atau menerima barang, menentukan produk akhir dalam perusahaan, dan juga diluar kepentingan untuk melaksanakan perundangan-undangan, misalnya yang menyangkut bidang kesehatan, keselamatan dan olah raga.

Menyerahkan atau menerima barang adalah merupakan kegiatan yang dapat atau mempunyai akibat hukum mengenai serah terima barang baik yang diikuti oleh penyerahan atau penerimaan uang, misalnya penyerahan atau penerimaan barang antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya.

Menentukan produk akhir dalam perusahaan meliputi penentuan kuantita (isi, berat atau panjang) suatu produk yang sudah jadi dari suatu perusahaan.

Melaksanakan peraturan perundang-undangan mempunyai pengertian bahwa pekerjaan tersebut dilakukan untuk memenuhi suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Yang dimaksud dengan orang pribadi atau badan adalah pengguna jasa secara pribadi atau yang berbadan hukum.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan jenis pelayanan adalah pekerjaan berupa tera atau tera ulang atau kalibrasi dan atau justir.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

ayat(1)

- Jenis dan tarif disusun dengan mempertimbangkan
- a. Kapasitas maksimum dari penggunaan alat UTTP;
 - b. Tingkat kesulitan pengujian;
 - c. Waktu pelaksanaan;
 - d. Tingkat ketelitian alat UTTP;
 - e. Nilai atau harga alat UTTP.

Ayat(2)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Kegiatan pelayanan tera, tera ulang dan kalibrasi alat UTTP dilaksanakan pada tempat-tempat berikut:

- Di Balai Pelayanan Kemetrolgian untuk melayani para wajib tera pada setiap hari kerja.
- Di tempat-tempat dan waktu yang telah ditentukan pada daerah-daerah Kabupaten dalam Kabupaten Merangin.
- Di tempat dimana alat UTTP tersebut berada dan atau terpasang.

Pasal 14

Ayat(2)

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah Surat yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan SKRD.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Yang dimaksud dengan pertimbangan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan adalah suatu kondisi dimana kegiatan tera, tera ulang atau kalibrasi dilaksanakan di daerah Kecamatan yang jarak tempuhnya memerlukan waktu cukup lama atau jumlah retribusi relatif kecil sehingga tidak efisien untuk melakukan penyetoran.

Pasal 17

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, jangka waktu dilakukan tera dan tera ulang diatur oleh Menteri yang membidangi masalah kemetrolgian melalui Surat Keputusan tentang Tanda Tera yang dikeluarkan setiap tahunnya, saat ini Menteri Perdagangan.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
ayat(1)
Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
Ayat(2) s/d (6)
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
ayat(1) : Yang dimaksud dengan penagihan retribusi
kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga)
tahun adalah apabila wajib retribusi terkena musibah
dan atau kejadian yang tidak terduga berdasarkan
hasil penelitian pihak yang berwenang.
ayat(2)
Cukup jelas

Pasal 27
ayat(1) : Yang dimaksud dengan diancam pidana kurungan
paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-
banyaknya Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta
rupiah) adalah merupakan ancaman pidana dalam
bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh wajib
retribusi dan kepadanya dikenakan ancaman pidana
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau dikenakan
ancaman denda paling banyak
Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
ayat(2)
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR : TAHUN 2013

TANGGAL : 2013

JENIS DAN TARIF RETRIBUSI TERA ALAT-ALAT UTTP
 PADA BALAI PELAYANAN KEMETROLOGIAN
 DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	JENIS ALAT-ALAT UTTP	TERA	TERA ULANG	KALIBRASI	JUSTIR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	UKURAN PANJANG				
	a. sampai dengan 2 meter	Rp. 2,000	Rp. 1,000	Rp. 3,000	
	b. Lebih dari 2 meter sampai dengan 10 meter	Rp. 4,000	Rp. 2,000	Rp. 5,000	
	c. Lebih dari 10 meter, tarif 10 meter ditambah untuk tiap 10 meter atau bagiannya	Rp. 4,000	Rp. 2,000	Rp. 5,000	
2.	TAKARAN KERING ATAU TAKARAN BASAH				
	a. sampai dengan 2 liter	Rp. 1,500	Rp. 500	Rp. 2,000	
	b. Lebih dari 2 liter sampai dengan 10 liter	Rp. 1,500	Rp. 750	Rp. 3,000	
	c. Lebih dari 10 liter	Rp. 4,000	Rp. 2,000	Rp. 5,000	
3.	BEJANA UKUR				
	a. sampai dengan 20 liter	Rp. 15,000	Rp. 10,000	Rp. 15,000	Rp. 5,000
	b. Lebih dari 20 liter sampai dengan 100 liter	Rp. 30,500	Rp. 20,000	Rp. 30,000	Rp. 10,000
	c. Lebih dari 10 liter	Rp. 40,000	Rp. 25,000	Rp. 40,000	Rp. 12,500
	d. Lebih dari 500 liter sampai dengan 1,000 liter	Rp. 40,000	Rp. 20,000	Rp. 40,000	Rp. 10,000
	e. Lebih dari 1,000 liter tarif 1,000 liter ditambah untuk setiap 1,000 liter atau bagiannya dengan	Rp. 50,000	Rp. 30,000	Rp. 50,000	Rp. 15,000
4.	ANAK TIMBANGAN				
1.	ANAK TIMBANGAN BIASA				
	a. sampai dengan 1 kilogram	Rp. 600	Rp. 300	Rp. 1,500	Rp. 200
	b. Lebih dari 1 kilogram sampai dengan 5 kilogram	Rp. 1,000	Rp. 500	Rp. 2,000	Rp. 300
	c. Lebih dari 5 kilogram, sampai dengan 50 kilogram	Rp. 2,000	Rp. 1,000	Rp. 3,000	Rp. 500
2.	ANAK TIMBANGAN HALUS				
	a. sampai dengan 1 kilogram	Rp. 1,000	Rp. 500	Rp. 2,000	Rp. 250
	b. Lebih dari 1 kilogram sampai dengan 5 kilogram	Rp. 1,500	Rp. 700	Rp. 3,000	Rp. 300
	c. Miligram	Rp. 750	Rp. 500	Rp. 1,500	

5.	TIMBANGAN MEKANIK					
1.	DACIN LOGAM					
	a.	sampai dengan 25 kilogram	Rp. 3,000	Rp. 2,000	Rp. 4,000	Rp. 1,000
	b.	Lebih dari 25 kilogram sampai dengan 100 kilogram	Rp. 4,000	Rp. 3,000	Rp. 5,000	Rp. 1,500
	c.	Lebih dari 10 kilogram	Rp. 5,000	Rp. 4,000	Rp. 6,000	Rp. 2,000
2.	TIMBANGAN MEJA					
	a.	sampai dengan 10 kilogram	Rp. 3,000	Rp. 2,000	Rp. 4,000	Rp. 1,000
	b.	Lebih dari 10 kilogram	Rp. 4,000	Rp. 3,000	Rp. 5,000	Rp. 1,500
3.	TIMBANGAN PEGAS					
	a.	sampai dengan 25 kilogram	Rp. 3,000	Rp. 3,000	Rp. 4,000	Rp. 1,500
	b.	Lebih dari 25 kilogram sampai dengan 100 kilogram	Rp. 5,000	Rp. 4,000	Rp. 6,000	Rp. 2,000
	c.	Lebih dari 100 kilogram	Rp. 7,000	Rp. 6,000	Rp. 8,000	Rp. 3,000
4.	TIMBANGAN KUADRAN/ SURAT		Rp. 3,000	Rp. 2,000	Rp. 4,000	Rp. 1,000
5.	TIMBANGAN BOBOT INGSUT					
	a.	sampai dengan 25 kilogram	Rp. 5,000	Rp. 3,000	Rp. 6,000	Rp. 1,500
	b.	Lebih dari 25 kilogram sampai dengan 100 kilogram	Rp. 6,000	Rp. 4,000	Rp. 8,000	Rp. 2,000
	c.	Lebih dari 100 kilogram sampai dengan 250 kilogram	Rp. 8,000	Rp. 6,000	Rp. 10,000	Rp. 3,000
	d.	Lebih dari 250 kilogram sampai dengan 500 kilogram	Rp. 10,000	Rp. 8,000	Rp. 12,000	Rp. 4,000
	e.	Lebih dari 500 kilogram sampai dengan 1,000 kilogram	Rp. 15,000	Rp. 10,000	Rp. 20,000	Rp. 5,000
	f.	Lebih dari 1,000 kilogram sampai dengan 3,000 kilogram	Rp. 20,000	Rp. 12,000	Rp. 25,000	Rp. 6,000
6.	TIMBANGAN CEPAT					
	a.	sampai dengan 25 kilogram	Rp. 5,000	Rp. 3,000	Rp. 6,000	Rp. 1,500
	b.	Lebih dari 25 kilogram sampai dengan 100 kilogram	Rp. 6,000	Rp. 4,000	Rp. 8,000	Rp. 2,000
	c.	Lebih dari 100 kilogram sampai dengan 250 kilogram	Rp. 8,000	Rp. 6,000	Rp. 10,000	Rp. 3,000
	d.	Lebih dari 250 kilogram sampai dengan 500 kilogram	Rp. 10,000	Rp. 8,000	Rp. 12,000	Rp. 4,000
	e.	Lebih dari 500 kilogram sampai dengan 1,000 kilogram	Rp. 15,000	Rp. 10,000	Rp. 20,000	Rp. 5,000
	f.	Lebih dari 1,000 kilogram sampai dengan 3,000 kilogram	Rp. 20,000	Rp. 12,000	Rp. 25,000	Rp. 6,000
7.	TIMBANGAN SENTISIMAL					
	a.	sampai dengan 25 kilogram	Rp. 8,000	Rp. 6,000	Rp. 10,000	Rp. 3,000
	b.	Lebih dari 250 kilogram sampai dengan 500 kilogram	Rp. 10,000	Rp. 8,000	Rp. 12,000	Rp. 4,000

		c.	Lebih dari 500 kilogram sampai dengan 1,000 kilogram	Rp. 15,000	Rp. 10,000	Rp. 20,000	Rp. 5,000
		d.	Lebih dari 1,000 kilogram sampai dengan 3,000 kilogram	Rp. 20,000	Rp. 12,000	Rp. 25,000	Rp. 6,000
	8.	NERACA					
		a.	Neraca Biasa	Rp. 7,500	Rp. 5,000	Rp. 8,000	
		b.	Neraca Emas	Rp. 10,000	Rp. 7,500	Rp. 11,000	
		c.	Neraca Obat	Rp. 15,000	Rp. 10,000	Rp. 16,000	
	6.	TIMBANGAN ELEKTRONIK					
		1.	Timbangan Elektronik Kelas III dan IIII (biasa dan sedang)				
		a.	sampai dengan 1 kilogram	Rp. 7,500	Rp. 4,000	Rp. 10,000	Rp. 2,000
		b.	Lebih dari 1 kilogram sampai dengan 10 kilogram	Rp. 10,000	Rp. 6,000	Rp. 12,500	Rp. 3,000
		c.	Lebih dari 10 kilogram sampai dengan 100 kilogram	Rp. 12,500	Rp. 8,000	Rp. 15,000	Rp. 4,000
		d.	Lebih dari 100 kilogram sampai dengan 250 kilogram	Rp. 15,000	Rp. 10,000	Rp. 17,500	Rp. 5,000
		e.	Lebih dari 250 kilogram sampai dengan 500 kilogram	Rp. 17,500	Rp. 12,000	Rp. 20,000	Rp. 6,000
		f.	Lebih dari 500 kilogram sampai dengan 1,000 kilogram	Rp. 20,000	Rp. 15,000	Rp. 25,000	Rp. 7,500
		g.	Lebih dari 1,000 kilogram sampai dengan 3,000 kilogram	Rp. 25,000	Rp. 15,000	Rp. 30,000	Rp. 10,000
		2.	Timbangan Elektronik Kelas II (halus)				
		a.	sampai dengan 1 kilogram	Rp. 10,000	Rp. 6,000	Rp. 12,500	Rp. 3,000
		b.	Lebih dari 1 kilogram sampai dengan 10 kilogram	Rp. 12,500	Rp. 8,000	Rp. 15,000	Rp. 4,000
		c.	Lebih dari 10 kilogram sampai dengan 100 kilogram	Rp. 15,000	Rp. 10,000	Rp. 17,500	Rp. 5,000
		d.	Lebih dari 100 kilogram sampai dengan 250 kilogram	Rp. 17,500	Rp. 12,000	Rp. 20,000	Rp. 6,000
		e.	Lebih dari 250 kilogram sampai dengan 500 kilogram	Rp. 20,000	Rp. 15,000	Rp. 30,000	Rp. 7,500
		f.	Lebih dari 500 kilogram sampai dengan 1,000 kilogram	Rp. 25,000	Rp. 20,000	Rp. 35,000	Rp. 10,000
		g.	Lebih dari 1,000 kilogram sampai dengan 3,000 kilogram	Rp. 30,000	Rp. 25,000	Rp. 40,000	Rp. 12,500
		3.	Timbangan Elektronik Kelas I (khusus)				
		a.	sampai dengan 10 kilogram	Rp. 20,000	Rp. 15,000	Rp. 25,000	Rp. 10,000
	7.	TIMBANGAN JEMBATAN MEKANIK / ELEKTRONIK					
		1.	Timbangan Jembatan 1 (Satu) Indikator				
			Kapasitas dalam ton, setiap ton	Rp. 4,000	Rp. 3,000	Rp. 3,500	Rp. 500
			dengan minimal Rp. 50,000,-				

2.	Timbangan Jembatan 2 (Dua) Indikator					
		Kapasitas dalam ton, setiap ton	Rp. 5,000	Rp. 4,000	Rp. 4,500	Rp. 500
		dengan minimal Rp. 75,000,-				
8.	TIMBANGAN BAN BERJALAN					
	a.	sampai dengan ton/jam	Rp. 150,000	Rp. 125,000	Rp. 150,000	Rp. 50,000
	b.	Lebih dari 100 ton/jam sampai dengan 500 ton/jam	Rp. 250,000	Rp. 200,000	Rp. 250,000	Rp. 100,000
	c.	Lebih dari 500 ton/jam	Rp. 350,000	Rp. 300,000	Rp. 350,000	Rp. 150,000
9.	METER TAKSI					
		Pengujian berdasarkan jarak dan waktu	Rp. 15,000	Rp. 10,000	Rp. 15,000	Rp. 5,000
10.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK					
	1.	Meter Kerja				
	a.	sampai dengan 15 m3/h	Rp. 30,000	Rp. 30,000	Rp. 30,000	Rp. 15,000
	b.	Lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h	Rp. 40,000	Rp. 40,000	Rp. 40,000	Rp. 20,000
	c.	Lebih dari 100 m3/h	Rp. 60,000	Rp. 60,000	Rp. 60,000	Rp. 30,000
	2.	Meter Induk (Master Meter)				
	a.	sampai dengan 15 m3/h	Rp. 50,000	Rp. 50,000	Rp. 50,000	Rp. 25,000
	b.	Lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h	Rp. 70,000	Rp. 70,000	Rp. 70,000	Rp. 30,000
	c.	Lebih dari 100 m3/h	Rp. 100,000	Rp. 100,000	Rp. 100,000	Rp. 50,000
	3.	Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak				
	a.	Untuk setiap badan ukur	Rp. 25,000	Rp. 15,000	Rp. 25,000	Rp. 7,500
	4.	Meter Gas				
	a.	sampai dengan 50 m3/h	Rp. 20,000	Rp. 15,000	Rp. 25,000	Rp. 5,000
	b.	Lebih dari 50 m3/h dihitung sbb:	Rp. 40,000	Rp. 40,000	Rp. 40,000	Rp. 20,000
		1.) 50 m3/h pertama	Rp. 20,000	Rp. 15,000	Rp. 25,000	Rp. 5,000
		2.) Selebihnya dari 50 m3/h sampai dengan 500 m3/h				
		setiap 10 m3/h	Rp. 1,000	Rp. 1,000	Rp. 1,500	Rp. 200
		3.) Selebihnya dari 500 m3/h sampai dengan 1,000 m3/h				
		setiap 10 m3/h	Rp. 500	Rp. 500	Rp. 750	Rp. 150
		4.) Selebihnya dari 1,000 m3/h sampai dengan 2,000 m3/h				
		setiap 10 m3/h	Rp. 200	Rp. 200	Rp. 300	Rp. 50
		5.) Selebihnya dari 2,000 m3/h setiap 10 m3/h	Rp. 100	Rp. 100	Rp. 125	Rp. 25
		Bagian dari 10 m3/h dihitung 10 m3/h				

5.	Meter Air					
	a.	Kapasitas 10 m3/h dan kurang	Rp. 500	Rp. 500	Rp. 500	Rp. 250
	b.	Kapasitas 10 m3/h sampai dengan 100 m3/h	Rp. 4,000	Rp. 4,000	Rp. 4,000	Rp. 2,000
	c.	Kapasitas 100 m3/h Lebih	Rp. 10,000	Rp. 10,000	Rp. 10,000	Rp. 5,000
6.	Meter Listrik					
	a.	1 phasa kelas 2	Rp. 1,000	Rp. 1,000	Rp. 1,000	Rp. 400
	b.	3 phasa kelas 2	Rp. 3,000	Rp. 3,000	Rp. 3,000	Rp. 1,200
	c.	1 phasa kelas 0.5 atau kelas 1	Rp. 1,500	Rp. 1,500	Rp. 1,500	Rp. 600
	d.	3 phasa kelas 0.5 atau kelas 1	Rp. 5,000	Rp. 5,000	Rp. 5,000	Rp. 2,000
		Meter Pembatas Arus	Rp. 1,000	Rp. 1,000	Rp. 1,000	Rp. 500
11.	ALAT UKUR VOLUMETRIK					
	1.	Meter Prover				
	a.	Kapasitas 2,000 liter dan kurang/seksi	Rp. 100,000	Rp. 100,000	Rp. 100,000	
	b.	Kapasitas 2,000 liter sampai dengan 10,000 liter/seksi	Rp. 200,000	Rp. 200,000	Rp. 200,000	
	c.	Kapasitas lebih dari 10,000 liter/seksi	Rp. 300,000	Rp. 300,000	Rp. 300,000	
	2.	Alat Ukur dari Gelas				
	a.	Labu ukur, buret dan pipet	Rp. 10,000	Rp. 5,000	Rp. 10,000	
	b.	Gelas ukur setiap 10 milliliter dikalikan dengan	Rp. 100	Rp. 100	Rp. 100	
	3.	Tangki Ukur Tetap dan Tangki Apung				
	A.	Bentuk Silinder Tegak				
	1.	sampai dengan 500 kL	Rp. 150,000	Rp. 150,000	Rp. 150,000	
	2.	Lebih dari 500 kL dihitung sbb:				
		a. 500 kL pertama	Rp. 150,000	Rp. 150,000	Rp. 150,000	
		b. Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1,000 kL				
		setiap 10 kL	Rp. 2,000	Rp. 2,000	Rp. 2,000	
		c. Selebihnya dari 1,000 kL sampai dengan 2,000 kL				
		setiap 10 kL	Rp. 1,000	Rp. 1,000	Rp. 1,000	
		d. Selebihnya dari 2,000 kL sampai dengan 5,000 kL				
		setiap 10 kL	Rp. 750	Rp. 750	Rp. 750	
		e. Selebihnya dari 5,000 kL sampai dengan 20,000 kL				
		setiap 10 kL	Rp. 250	Rp. 250	Rp. 250	
		f. Selebihnya dari 20,000 kL, setiap 10 kL	Rp. 150	Rp. 150	Rp. 150	
		Bagian dari 10 kL dihitung 10 kL				
	B.	Bentuk Bola dan Sferodial				
	1.	sampai dengan 500 kL	Rp. 250,000	Rp. 250,000	Rp. 250,000	

		2.	Lebih dari 500 kL dihitung sbb:				
			a. 500 kL pertama	Rp. 250,000	Rp. 250,000	Rp. 250,000	
			b. Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1,000 kL				
			setiap 10 kL	Rp. 3,500	Rp. 3,500	Rp. 3,500	
			c. Selebihnya dari 1,000 kL, setiap 10 kL	Rp. 2,500	Rp. 2,500	Rp. 2,500	
			Bagian dari 10 kL dihitung 10 kL				
		C.	Bentuk Silinder Datar				
		1.	sampai dengan 10 kL	Rp. 250,000	Rp. 250,000	Rp. 250,000	
		2.	Lebih dari 10 kL dihitung sbb:				
			a. 10 kL pertama	Rp. 250,000	Rp. 250,000	Rp. 250,000	
			b. Selebihnya dari 10 kL sampai dengan 50 kL				
			setiap 1 kL	Rp. 2,500	Rp. 2,500	Rp. 2,500	
			c. Selebihnya dari 50 kL, setiap 1 kL	Rp. 1,500	Rp. 1,500	Rp. 1,500	
	4.		Tangki Ukur Gerak				
		A.	Tangki Ukur Mobil dan Wagon				
		1.	sampai dengan 5 kL	Rp. 20,000	Rp. 20,000	Rp. 20,000	Rp. 10,000
		2.	Lebih dari 5 kL dihitung sbb:				
			a. 5 kL pertama	Rp. 20,000	Rp. 20,000	Rp. 20,000	Rp. 10,000
			b. Selebihnya dari 5 kL, setiap 1 kL	Rp. 4,000	Rp. 4,000	Rp. 4,000	Rp. 1,000
			Bagian dari kL dihitung 1 kL				
		B.	Tangki Ukur Tongkang dan Apung				
		1.	sampai dengan 50 kL	Rp. 100,000	Rp. 100,000	Rp. 100,000	
		2.	Lebih dari 50 kL dihitung sbb:				
			a. 50 kL pertama	Rp. 100,000	Rp. 100,000	Rp. 100,000	
			b. Selebihnya dari 50 kL sampai dengan 75 kL				
			setiap 1 kL	Rp. 1,500	Rp. 1,500	Rp. 1,500	
			c. Selebihnya dari 75 kL sampai dengan 100 kL				
			setiap 1 kL	Rp. 1,200	Rp. 1,200	Rp. 1,200	
			d. Selebihnya dari 100 kL sampai dengan 250 kL				
			setiap 1 kL	Rp. 1,000	Rp. 1,000	Rp. 1,000	
			e. Selebihnya dari 250 kL sampai dengan 500 kL				
			setiap 1 kL	Rp. 750	Rp. 750	Rp. 750	
			f. Selebihnya dari dari 500 kL sampai dengan 5,000 kL				
			setiap 1 kL	Rp. 300	Rp. 300	Rp. 300	
			Bagian dari kL dihitung 1 kL				

12.	ALAT UKUR TINGGI, WAKTU, SUHU DAN LAINNYA					
	a.	Alat Pencap Kartu Otomatis (Printer/Recorder)	Rp. 5,000	Rp. 5,000	Rp. 5,000	
	b.	Alat Pencap Kartu Tidak Otomatis	Rp. 4,000	Rp. 4,000	Rp. 4,000	
	c.	Meter Kadar Air	Rp. 4,000	Rp. 4,000	Rp. 4,000	
	d.	Alat Ukur Textile Kabel dan sejenisnya	Rp. 5,000	Rp. 5,000	Rp. 5,000	
	e.	Alat Ukur Tinggi	Rp. 3,000	Rp. 3,000	Rp. 3,000	
	f.	Alat Ukur Permukaan Cairan (Level Gauge) Mekanik	Rp. 15,000	Rp. 15,000	Rp. 15,000	
	g.	Alat Ukur Permukaan Cairan (Level Gauge) Elektronik	Rp. 20,000	Rp. 20,000	Rp. 20,000	
	h.	Stop Watch (Pengukur Waktu)	Rp. 3,000	Rp. 3,000	Rp. 3,000	
	i.	Speedometer (Pengukur Kecepatan)	Rp. 3,000	Rp. 3,000	Rp. 3,000	
	j.	Meter Parkir	Rp. 2,000	Rp. 2,000	Rp. 2,000	
	k.	Naraca Analitis	Rp. 10,000	Rp. 10,000	Rp. 10,000	
	l.	Naraca Substitusi	Rp. 10,000	Rp. 10,000	Rp. 10,000	
	m.	Thermometer	Rp. 3,000	Rp. 3,000	Rp. 3,000	
	n.	Wadah curah setiap liternya dikalikan dengan	Rp. 1000	Rp. 1000	Rp. 1000	
	o.	Mesin/Alat Ukur Luas	Rp. 3,000	Rp. 3,000	Rp. 3,000	
	p.	Alat Ukur Sudut	Rp. 3,000	Rp. 3,000	Rp. 3,000	
	r.	Blok Gauge (Blok Ukur)	Rp. 5,000	Rp. 5,000	Rp. 5,000	
	s.	Micrometer	Rp. 3,000	Rp. 3,000	Rp. 3,000	
	t.	Aerometer dan Densimeter	Rp. 4,000	Rp. 4,000	Rp. 4,000	
	u.	Perlengkapan Meter Arus BBM	Rp. 5,000	Rp. 5,000	Rp. 5,000	
	v.	Perlengkapan Meter Gas Orofis	Rp. 5,000	Rp. 5,000	Rp. 5,000	
	u.	Alat-alat ukur presisi lainnya	Rp. 5,000	Rp. 5,000	Rp. 5,000	

BUPATI MERANGIN,

ttd

NALIM

